

KEGIATAN DPR-RI AKHIR JANUARI 2012

Kegiatan DPR-RI akhir bulan Januari 2012 ini tetap diwarnai oleh berbagai kegiatan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Kegiatan Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7, di Palembang, juga merupakan fokus kegiatan DPR-RI akhir bulan ini. Berikut ringkasan beberapa kegiatan DPR-RI akhir Januari 2012.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Pada Selasa, (24/01), Komisi VII DPR-RI melakukan Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan RDP dengan Ketua Harian DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim). Rapat yang dipimpin oleh H. Achmad Fariad dan dihadiri 43 dari 53 anggota Komisi VII, membahas Evaluasi Kinerja 2011 dan Rencana Kerja 2012. Pertemuan ini menyimpulkan 4 hal yaitu, Komisi VII meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan DNPI untuk [1] meningkatkan manajemen penyerapan anggaran pada pelaksanaan anggaran di tahun yang akan datang dan membuat action plant triwulan pada APBN 2012 untuk dilaporkan berkala kepada Komisi VII, [2] melakukan penyempurnaan terhadap dokumen kegiatan prioritas, termasuk indikator keberhasilan kinerja serta membuat laporan menyangkut program/kegiatan pada tahun 2011 yang pelaksanaannya terhambat dan tingkat penyerapannya rendah, [3] agar fokus pada penguatan posisi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di forum Internasional, regional dan nasional, serta merumuskan kajian program mitigasi dan adaptasi berdasar kondisi kearifan lokal, sosial, ekonomi masyarakat Indonesia, [4] melakukan kajian secara komprehensif menyangkut potensi tingkat kerusakan lingkungan dan dampak budaya, sosial, ekonomi yang diperoleh terkait rencana kegiatan pertambangan khususnya di wilayah Raja Ampat, Papua Barat.

Pada Rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan RI (Menhut-RI), Selasa (24/01), disimpulkan bahwa Komisi IV mengapresiasi atas serapan APBN 2011 Kementerian Kehutanan sebesar 87,60% dari total pagu APBN 2011. Namun demikian, Komisi IV meminta agar penyerapan angga-



ran pada 2012 diatas 65%. Komisi IV juga mengapresiasi tindak lanjut Kementerian Kehutanan terhadap temuan BPK pada laporan keuangan semester I tahun 2011. Komisi IV meminta agar Menhut-RI menyelesaikan berbagai temuan BPK yang belum tuntas, baik yang terkait dengan belum optimalnya fungsi sistem pengendalian internal dan temuan akibat kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah mencabut tanda bintang program bantuan sosial Pengembangan Perhutanan masyarakat pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) di Kementerian Kehutanan. Komisi IV DPR meminta Pemerintah agar dalam waktu

singkat menyelesaikan sengketa lahan dalam kawasan hutan, khususnya di daerah Pulau Padang Riau, Mesuji Lampung, di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan berbagai tempat lainnya, juga menindak tegas pelaku *illegal logging*, khususnya di Riau (Pulau Padang) dan Kalimantan Selatan (Tanah Bambu). DPR juga meminta Pemerintah tidak memberi ijin perluasan IPPKH kepada 13 perusahaan tambang yang tercantum dalam perpu No. 1 tahun 2004 tentang ijin melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, khususnya kepada PT. Freeport Indonesia dan PT. Inco, sebelum perusahaan-perusahaan tersebut memberikan laporan tentang kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selain Komisi VII dan IV DPR-RI, Komisi VIII juga melakukan Raker dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, pada hari Selasa (24/01). Raker yang membahas Pelaksanaan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyimpulkan beberapa hal penting antara lain; Komisi VII memberikan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



catatan dan penekanan penting untuk segera ditindaklanjuti agar Pemerintah lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai bidang, penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (PPTPO) melalui koordinasi pusat dan daerah, peningkatan perhatian terhadap tumbuh-kembang anak melalui pembentukan karakter dan pola asuh di usia dini. DPR juga meminta agar tersedia lengkap data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender dan anak pada kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh kementerian, serta pengembangan database PUG dalam monitoring/evaluasi terhadap kebijakan, program, kegiatan di masing-masing institusi pemerintah, agar dapat diwujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Komisi VII bersama kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sepakat melakukan rakornas dengan kapolri, kemensos ri, kemenag ri, KPAI, kementerian dalam negeri RI, badan narkotika nasional, menaker ri, kementerian koperasi dan UKM, serta kementerian/lembaga lainnya dalam mengoptimalkan komitmen para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Komisi VIII DPR juga mendorong perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Komisi I DPR pada Selasa, (24/01), juga melakukan Rapat kerja dengan pemerintah. Hadir mewakili pemerintah adalah Purnomo Yusgiantoro (Menhan RI), Sjafrie Sjamsuddin (Wamenhan), Marsdy TNI Eris Herryanto (Sekjen Kemhan), Laks. TNI Agus Suhartono (Panglima TNI), Jend. TNI Pramono Edhie Wibowo (KASAD), Laks. TNI Soeparno (KASAL), Marsekal TNI Imam Sufaat (KASAU), beserta jajaran. Raker ini menyimpulkan 2 hal yaitu: [1] Komisi I DPR-RI memberikan apresiasi terhadap tingginya penyerapan anggaran Kemhan/TNI tahun 2011 dan mendorong peningkatan status audit laporan keuangan berikutnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan [2] untuk alokasi pengadaan alutsista melalui APP (Alokasi Pinjaman Pemerintah) Kemhan/TNI tahun anggaran 2010-2014 sebesar USD 6,5 miliar, Komisi I DPR-RI melalui panja Alutsista bersama Wamenhan RI selaku Ketua HLC akan melakukan pembahasan lanjutan dan ditargetkan untuk selesai pada Masa Persidangan III tahun sidang 2011-2012 ini.

Sementara, pada Rabu (25/01), Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyimpulkan 9 hal, antara lain; Komisi IX DPR mendesak Pemerintah agar melakukan terobosan dalam program dan kegiatan, termasuk penggunaan dana pendidikan sehingga penyerapan anggaran 2012 lebih optimal; meningkatkan revitalisasi BLK dengan memperhatikan kebutuhan sarana prasarana BLK di daerah, dana pendidikan bagi tenaga kerja di daerah, kompetensi tenaga kerja dan kemanfaatan BLK sebagai *pilot project* pembukaan lapangan kerja yang sesuai kebutuhan pasar; meningkatkan revitalisasi KTM transmigrasi, termasuk menyelesaikan permasalahan terkait sengket tanah. Komisi IX juga meminta Pemerintah dalam

proses penempatan TKI ke Malaysia pasca pencabutan moratorium penempatan TKI agar melakukan kajian terhadap kebijakan Malaysia terhadap TKI, sistem transfer gaji, *road map* pemberhentian penempatan TKI non-formal tahun 2017, dan lain-lain. Komisi IX juga meminta kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan komprehensif terkait strategi dan program tentang kesehatan dan keselamatan kerja; mengambil kebijakan yang tepat dengan merevisi Surat Edaran Dirjen PHI dan Jamsostek Kemenakertrans RI, sebagai upaya penyesuaian putusan MK mengenai pemborong pekerjaan dan PKWT, dan lain-lain.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN ANGGARAN

Komisi-Komisi, Badan Legislasi, dan Pansus tetap melanjutkan pembahasan RUU Prioritas tahun 2012, utamanya RUU yang sudah memasuki pembahasan tingkat I.

Kegiatan bidang anggaran dalam minggu-minggu ini, Komisi-Komisi DPR tetap melakukan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah/pasangan kerja dengan agenda Evaluasi Kinerja Kementerian tahun 2011, Realisasi Anggaran Kementerian TA 2011, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian TA 2011 dan Rencana Program Kerja Kementerian tahun 2012.

KONFERENSI PUIC KE-7 DI PALEMBANG

Beberapa hal penting dari rangkaian pertemuan dan sidang pada Konferensi PUIC ke-7 di Palembang, 24-31 Januari 2012 adalah penyelenggaraan pertemuan pertama Perempuan Muslim Anggota Parlemen Negara Anggota PUIC. Langkah perdana ini diperkuat dengan Deklarasi guna meningkatkan peran serta perempuan muslim dalam kehidupan sosial politik, perlindungan hak perempuan muslim, dan juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam memecahkan masalah dan melakukan resolusi. Langkah awal ini diharapkan dapat membuka kesempatan bagi para perempuan muslim Anggota Parlemen untuk terus dapat memberikan saran dan masukan dalam sidang-sidang khusus bagi perempuan pada konferensi-konferensi PUIC yang akan datang.

Masalah Palestina juga menjadi salah satu agenda penting yang diangkat dalam Konferensi PUIC kali ini. Tidak hanya melalui Konferensi Perempuan Muslim dalam Deklarasinya yang berkeinginan mengurangi penderitaan para perempuan dan anak-anak yang ada di Palestina, melalui salah satu pembahasan penting dalam Sidang Komisi Khusus Politik dan Ekonomi Palembang, Delegasi Indonesia mendukung Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta mendukung sepenuhnya upaya Palestina dalam memperoleh keanggotaan penuh di PBB. Pesan Delegasi Indonesia yang tak kalah pentingnya juga disampaikan melalui sidang-sidang 2 Komisi Khusus lain, yaitu Komisi Khusus bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan serta Komisi Khusus bidang Perempuan, Sosial, dan Budaya melalui rapat-rapat yang dilaksanakan secara paralel pada 26 dan 27 Januari yang lalu.*

DPR Jadi Tuan Rumah PUIC

DPR RI mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7 yang akan diselenggarakan di Palembang dari tanggal 24 – 31 Januari 2012.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan keterangan pers di konferensi PUIC



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Sampai berita ini diturunkan, sebanyak 36 negara dari 51 negara peserta menyatakan konfirmasi untuk hadir dalam konferensi ini. Selain itu, juga akan hadir 7 observer, 6 tamu tuan rumah.

Dalam keterangan pers, Jum'at (20/1), Ketua DPR RI Marzuki Alie yang didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menyampaikan, Indonesia mendapat mandat sebagai Presiden PUIC pada tahun 2012, setelah 2011 menjabat sebagai Wakil Presiden PUIC.

Dengan semangat diversifikasi daerah tujuan penyelenggaraan acara internasional, DPR RI sepakat untuk memilih Palembang sebagai tuan rumah penyelenggaraan PUIC.

Salah satu alasan dipilihnya Palembang menjadi tuan rumah menurut Marzuki, karena nilai historis sejarah Islam adanya surat menyurat antara raja-raja Sriwijaya dengan salah

seorang khalifah pada zaman Bani Umayyah di Damaskus pada awal Islam masuk ke Indonesia.

Berdasarkan statuta PUIC, organisasi ini didirikan tidak hanya untuk penguatan kontak, kerja sama dan dialog antar parlemen anggota OKI dan wakil-wakilnya, tetapi juga untuk memperkenalkan ajaran luhur Islam dan berusaha untuk menyebarkannya dengan tetap menekankan sisi humanism dari peradaban Islam.

Marzuki menambahkan, PUIC juga didirikan untuk membina koordinasi antara bangsa-bangsa di dunia dalam rangka menghormati dan membela hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian berdasarkan keadilan.

Diselenggarakannya Konferensi PUIC ke-7 ini memiliki arti penting bagi Indonesia, karena merupakan Konferensi PUIC yang pertama kali diadakan di kawasan Asia Tenggara. Ketua DPR-

RI, akan menjadi Presiden PUIC untuk periode satu tahun kedepan.

Sejumlah agenda penting berkaitan dengan kepentingan ummat Islam, seperti isu-isu politik, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, dan juga sosial-budaya, akan dibahas dalam konferensi ini.

Konferensi ini akan menghasilkan sejumlah resolusi dan juga sebuah deklarasi, yakni Deklarasi Palembang, yang akan memuat pandangan, sikap dan juga komitmen parlemen-parlemen anggota PUIC terhadap berbagai persoalan global dan tantangan yang dihadapi ummat Islam dewasa ini.

“Kita berharap, pelaksanaan Konferensi PUIC ke-7 di Palembang, berjalan lancar dan sukses, begitu juga dengan kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden PUIC 2012-2013,” kata Marzuki. (tt) foto:ig/parle

Sidang PUIC Angkat Peran Perempuan Dalam Berdemokrasi

Sidang Executive Committee yang merupakan serangkaian dari pelaksanaan Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7 yang diselenggarakan di Palembang juga menyoroti peran serta berdemokrasi dari kalangan perempuan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid usai sidang Excom mengatakan, demokrasi di kalangan perempuan ini diusulkan Parlemen Indonesia untuk dibahas menjadi salah satu agenda dalam sidang ini.

Usulan ini disampaikan untuk melindungi kaum perempuan, bukan hanya kaitannya dengan masalah hak asasi kewanitaannya, tapi juga dalam hal peran serta berdemokrasi dari kalangan perempuan.

Menurut Hidayat, kita patut bersyukur, usul penting yang disampaikan Parlemen Indonesia dapat disetujui yaitu dalam organisasi parlemen OKI ini dihadirkan sayap parlemen perempuan dari persatuan parlemen negara-negara OKI.

Rencananya, bersamaan dengan pelaksanaan Sidang PUIC, akan diselenggarakan konferensi yang pertama di Indonesia pada tanggal 27 Januari nanti.

Hidayat menambahkan, salah satu yang akan dicapai dari usulan tersebut yaitu bagaimana melalui peran perempuan bisa mendorong hadirnya perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestina. Karena kita berharap dengan peran perempuan bisa menghadirkan satu dukungan emosi internasional untuk kemudian bisa mendesak berbagai pihak di Timur Tengah untuk bisa menghadirkan perdamaian di kawasan tersebut.

“Kalau kawasan Timur Tengah damai tentu Indonesia juga bisa memulailah dengan banyak hal yang lain,” kata Hidayat.

Termasuk yang diusulkan Indonesia dan dapat diterima dengan baik yaitu Resolusi untuk menjaga dan melindungi keberadaan daripada tenaga kerja asing di negara anggota OKI.

Kita tahu bahwa sebagean besar anggota OKI adalah negara-negara

Arab yang di Negara tersebut banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sana. Usulan ini sudah menjadi resolusi dan usulan baru yang disampaikan perlunya parlemen-parlemen negara OKI melakukan langkah-langkah yang operasional untuk merealisasikan melindungi tenaga kerja asing di negara masing-masing.

Hal ini mendapat dukungan bahkan oleh negara-negara yang dipersepsikan punya masalah seperti Saudi Ara-

hadirkan jaminan perlindungan tenaga kerja asing.

Hidayat juga menyampaikan dalam sidang kali ini juga akan dibahas masalah Palestina. Indonesia akan mengingatkan sikap dari negara-negara Parlemen OKI untuk melakukan kritik yang sangat keras terhadap perilaku Israel yang masih terus melakukan penahanan terhadap anggota Parlemen dari Palestina. Bahkan, Ketua Parlemen Palestina beberapa hari yang



Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid memberikan keterangan pers usai sidang excom di Hotel Aryaduta Palembang

bia, Kuwait, Yordan. Karena mereka menyadari bahwa masalah ini harus diselesaikan.

Dalam hal ini, parlemen harus terlibat, salah satunya melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mendorong hadirnya sebuah regulasi di negara masing-masing untuk meng-

lalu ditahan oleh Israel. Ini tentunya, sesuatu yang sangat mencederai keinginan untuk menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.

“Indonesia menyuarakan hal itu dan Indonesia yakin akan mendapatkan dukungan dari parlemen yang lain,” kata Hidayat. (tt) foto:ry/parle

BK Minta Barang Impor di Ruang Banggar Diganti Produk Dalam Negeri

Pemeriksaan yang dilakukan Badan Kehormatan – BK DPR RI terhadap beberapa pihak yang terkait proyek renovasi ruang rapat Banggar sudah mulai menemukan beberapa titik terang.



Wakil Ketua BK DPR RI, Siswono Yudo Husodo



Ruang rapat Banggar DPR RI

Dari keterangan yang diperoleh dari pihak konsultan pelaksana, anggaran renovasi senilai Rp.20.3 miliar seharusnya bisa dihemat sampai Rp.7 miliar lebih apabila barang impor yang digunakan diganti produk dalam negeri.

“BK sudah sepakat meminta

Sekjen untuk mengganti komponen impor dengan barang produk dalam negeri yang juga berkualitas bagus,” kata Wakil Ketua BK DPR RI, Siswono Yudo Husodo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/12).

Politisi dari Partai Golkar ini menye-

but barang impor yang patut diganti diantaranya kursi dari Jerman sebanyak 178 unit senilai Rp.4 miliar, monitor layar lebar dari Korea Rp.1,8 miliar. Selanjutnya karpet dari Amerika Rp.980 juta serta perangkat penerangan dari Belanda senilai Rp.1,9 miliar.

“Sekjen kita minta membicarakan dengan supplier-nya bagaimana mekanisme penggantian yang terbaik,” lanjutnya. Sebelumnya Badan Kehormatan sudah meminta keterangan dari pelaksana proyek yaitu konsultan perencana PT Gubah Laras, konsultan pengawas PT Jagad Semesta dan pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan.

Sementara itu anggota BK DPR RI Ali Maschan Moesa menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan sudah lengkap memanggil pihak-pihak terkait yaitu pimpinan BURT, Banggar, Sekjen dan perusahaan pelaksana proyek. Sejauh ini belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.

“Apa yang dilakukan BK ini dalam rangka menjaga marwah DPR yang hari-hari ini kita rasakan kondisinya sudah mencapai titik nadir. Kita terus upayakan ada perbaikan dari dalam. Semua pihak hendaknya melakukan introspeksi-lah, tidak saja anggota DPR termasuk juga supporting kita dari kesekjenan,” imbuhnya.

Ia menambahkan saat ini BK masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Apabila ditemukan ada penyimpangan penggunaan anggaran, pelanggaran tata tertib yang dilakukan anggota DPR, maka BK dipastikan akan menindaklanjutinya. “Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kita akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum,” tandas guru besar dari IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. (iky)

Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Stop Kirim TKI Informal

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mendesak Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menghentikan pengiriman TKI Informal secepat mungkin.

“Pemerintah itu harus segera menghentikan pengiriman TKI informal sampai ke titik ‘zero’ atau tidak ada pengiriman sama sekali secepatnya. Lalu kenapa harus sampai menunggu tahun 2017 baru dihentikan pengiriman TKI informalnya?” kata Herlini saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/1)

Herlini menyatakan bahwa semangat keberpihakan dan kepedulian pemerintah terhadap nasib tenaga kerja Indonesia di luar negeri diukur dengan secepatnya menghentikan pengiriman TKI informal tersebut.

Menurut Herlini, sudah selayaknya pemerintah melindungi WNI tanpa kecuali, termasuk jika kebijakan mengirim para TKI sektor informal ke luar negeri itu telah membahayakan WNI.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh majikannya adalah kaum perempuan. “Berdasarkan data yang di dapatkan dari Migrant Care, sekitar 70 persen dari sekitar enam juta TKI adalah perempuan sehingga yang paling banyak mengalami kekerasan adalah TKI wanita,” ujarnya.

Herlini meminta pemerintah agar



Anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran

sebaiknya fokus melakukan pembenahan sistem di internal kementerian dan lembaga terkait, mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, sebagai realisasi visi Presiden SBY dengan pendekatan pro-job.

Sementara itu data BNP2TKI menyebutkan, hingga akhir tahun 2011 angka penempatan TKI yang siap untuk diberangkatkan bekerja di Malaysia mencapai 510.690 orang pasca di bukanya moratorium pengiriman TKI untuk negara tersebut.

Jika dipersentasekan, penempatan TKI formal berkisar 41 persen dan 59 persennya masih TKI informal. Untuk penempatan TKI formal sangat terbuka luas di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Afrika.

Sebelumnya dalam rapat kerja tersebut Menakertrans Muhaimin Iskandar menjelaskan kebijakan ‘Roadmap’ Kemenakertrans yang berencana baru melakukan pemberhentian pengiriman TKI sektor informal, seperti pekerja domestik (PLRT) pada 2017.(sc) foto:parle

Pemerintah Harus Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI Hingga Tingkat Babinsa

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Achmad Daeng Sere meminta kepada Pemerintah untuk lebih dapat memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI hingga tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Babinsa memegang peran strategis dalam mendukung tugas TNI karena berhubungan langsung dengan masyarakat, serta berperan deteksi dini dan cegah dini untuk menjaga kemananan dan stabilitas

wilayahnya. Menurut dia, khusus mata darat TNI juga perlu memperhatikan tunjangan Babinsa.

“Sekarang ini hanya Rp.50 ribu tunjangan Babinsa, secara rasional peronil Babinsa tidak dapat merasakan

tunjangan kesejahteraan secara signifikan. Sebaiknya dapat kita bisa naikan hingga sebesar Rp. 300 ribu, kasihan Babinsa-Babinsa kita,” desak Achmad Daeng Sere dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Purnomo



Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono



Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere

Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, di Gedung Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (24/1).

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, juga mengharapkan Uang Lauk Pauk (ULP) bagi prajurit dinaikan hingga mencapai 75 ribu perhari. "Saya mencoba membuka hati Menhan dan Panglima disamping perbaikan rumah dinas TNI, tapi juga harus memperhatikan tunjangan ope-

rasional," kata Daeng Sere.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq saat memimpin Raker tersebut, mengatakan Isu kesejahteraan menjadi perhatian Komisi I dan Pemerintah. Dia menjelaskan Komisi I sepakat mengiringi Panja Alutsista yang berupaya mendorong modernisasi persenjataan TNI, komisi I sepakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan prajurit.

Upaya peningkatan kesejahteraan prajurit antara lain perumahan dinas

TNI, yang diperlukan perencanaan termasuk kebutuhan anggarannya, kedua dukungan kendaraan dinas, yang memang fakta dilapangan sangat memperhatikan, dan yang ketiga persoalan tunjangan, yang akan dibicarakan khusus dengan Kemhan dan Mabes TNI.

Menanggapi peningkatan kesejahteraan bagi Babinsa, Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan bahwa hanya bisa melengkapi Babinsa dengan dukungan motor. "Diberikan dukungan motor karena untuk memudahkan dalam melaksanakan diwilayah tugasnya," katanya.

Dia juga mengatakan keadaan Babinsa yang terpaksa menggunakan alat komunikasi dengan telepon genggam milik masing-masing personil, karena menurutnya setelah adanya BTS komunikasi dapat dilakukan dengan murah dan mudah. "Gunakan teknologi itu (handphone) untuk saling berkomunikasi dengan Danramil dengan Babinsa," kata Edhie Wibowo.

Selain itu, Panglima TNI menjelaskan bahwa Personil Babinsa ditugaskan pada wilayah kampungnya masing-masing sehingga ongkos dan biaya operasionalnya tidak terlalu mahal. (as) foto:parle

Komisi V Minta Masukan BANI dan BNSP Terkait UU Jasa Konstruksi

Komisi V DPR RI meminta masukan-masukan dari beberapa stakeholders terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UJJK).

Rencana Perubahan RUU ini sebetulnya juga sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2011. Namun karena belum selesai, RUU ini akhirnya diluncurkan lagi pada Prolegnas RUU Prioritas 2012.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi saat memimpin rapat dengan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Arbitration Nasional Indonesia (BANI), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Kamis (19/1) di gedung DPR.

Mulyadi mengatakan, masukan-masukan dari stakeholders yang terkait dengan UU ini tentunya sangat diharapkan untuk penyempurnaan UU dimaksud.

Karena UU ini merupakan luncuran dari Tahun 2010, jadi ini merupakan "PR" Komisi V untuk segera menyelesaikannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Bambang Goeritno mengatakan, UU Jasa Konstruksi ini memang sudah perlu dilakukan revisi, karena jika UU ini dievaluasi selama satu dasawarsa arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi belum jelas dan belum dilengkapi dengan perangkat evaluasi yang terstruktur.

Selain itu, sertifikasi isu sentral, prosesnya masih beragam dan belum menjadi quality assurance dalam perwujudan struktur usaha yang diharapkan.

Jenis pekerjaan (ASMET) tidak kompatibel dengan lapangan usaha nasional maupun internasional dan sertikat profesi bersifat sebagai lisensi (ijin kerja), padahal penerbitannya dilakukan bukan oleh Pemerintah.

Bambang mengatakan, isu-isu strategis berkenaan dengan UU ini

adalah adanya perubahan kebijakan nasional (regulasi) yang terkait jasa konstruksi (UU No. 23/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 20/2003 tentang Sisdiknas) serta implementasi liberalisasi perdagangan jasa konstruksi (import maupun ekspor jasa konstruksi)

Dari sisi internal, isu yang berkembang adalah kualitas pengaturan dalam UJJK kurang memadai serta pengaturan dalam UJJK tidak mampu lagi merespon perkembangan yang terjadi.

Tujuan pengaturan penyelenggaraan konstruksi agar pelaku konstruksi memiliki kapasitas kompetensi dan daya saing, proses konstruksi efisien, produktif, kreatif inovatif dan berkeadilan serta hasil konstruksi berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan.

Sementara wakil dari Bani menyoroti isi Pasal 36 dan 37 masalah penyelesaian sengketa jasa konstruksi.

Menurutnya, harus lebih serius memasukkan masalah sengketa jasa konstruksi ini mengingat semakin ba-

nyaknya kasus yang berkembang di bidang jasa konstruksi.

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Sumarna F. Andurahman mengatakan masalah yang terjadi terkait dengan sertifikasi profesi adalah adanya kesenjangan antara kualitas yang dimiliki tenaga kerja/SDM dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri.

Kesenjangan ini, kata Sumarna, menimbulkan dua akibat yakni terjadinya pengangguran dan rendahnya produktifitas. Kesenjangan tersebut terjadi terutama karena sistem diklat yang bersifat "supply driven" dan tidak berbasis pada kompetensi kerja. Selain itu, tidak adanya sistem diklat yang terpadu secara nasional.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatno mengatakan, yang terpenting dari perubahan UU ini adalah kasus kegagalan konstruksi hendaknya menjadi pelajaran berharga dan agar dapat dimasukkan dalam RUU ini. (tt) foto:parle



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Mulyadi

37 Negara Hadiri Sidang PUIC

Sampai berita ini diturunkan, sebanyak 37 negara dari 51 negara anggota PUIC akan menghadiri Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7 yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal 24 – 31 Januari.



Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid (tengah) di Sidang Executive Committee, Hotel Aryaduta, Palembang

Disela-sela sidang Executive Committee, Selasa (24/1) di Hotel Aryaduta, Palembang, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur wahid mengatakan, jumlah tersebut sudah melampaui kuorum dan sudah dapat mengambil keputusan.

Menurut Hidayat, jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah, seperti Mesir yang kemungkinan bisa hadir setelah selesai sidang internal di negaranya.

Dari 37 negara yang hadir, akan dihadiri 15 Ketua Parlemen dan tiga Wakil Ketua Parlemen serta 8 (delapan) observer.

Dan satu hal yang bersejarah menurut Hidayat, karena jarang sekali pertemuan negara-negara OKI bisa melampaui kuorum. Pada periode yang lalu dimana PUIC diselenggarakan di Abu

Dabhi juga tidak mencapai kuorum.

“Kita patut bangga jumlah anggota PUIC yang jumlahnya 51 negara, bisa dihadiri 37 negara,” katanya..

Hidayat menambahkan acara dalam Sidang PUIC ini dilakukan secara berjenjang dimana tanggal 24 dan 25 Januari dilaksanakan Executive Committee Meeting, setelah itu dilanjutkan dengan General Committee dan acara puncaknya tanggal 28 – 31 Januari pelaksanaan Sidang PUIC. Dan tanggal 27 Januari nanti akan ada seminar untuk parlemen perempuan.

Hidayat menjelaskan, alasan sidang ini diselenggarakan di Palembang, karena kita menginginkan masyarakat dunia tahu tentang Indonesia selain Jakarta, Bali serta dapat mengenal Palembang serta kota-kota lain di Indonesia.

Kita berharap, pelaksanaan sidang di Palembang ini akan berdampak ke-

pada peningkatan pengetahuan mereka tentang Indonesia, ketertarikan terhadap Indonesia, dan selanjutnya dapat menarik wisatawan mereka untuk datang ke Indonesia. Tentunya, kata Hidayat, hal itu menjadi sesuatu yang akan bermanfaat bagi Indonesia.

Hidayat menambahkan, Konferensi PUIC di Palembang akan menghasilkan keputusan penting dan Sekjen PUIC harus melakukan tindakan yang operasional untuk melakukan follow up dan control serta mengingatkan kepada masing-masing parlemen untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, apa yang telah disepakati bersama dijadikan keputusan dimasing-masing negara untuk kemudian dikomunikasikan dengan negara dari masing-masing parlemen itu. (tt) foto:ry/parle

Sukses Konferensi PUIC Angkat Harkat Martabat Bangsa di Dunia Arab

Peluang menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota OKI – PUIC merupakan kesempatan yang sangat baik menyampaikan pesan terutama kepada negara-negara Arab bahwa Indonesia tidak sekedar pengirim tenaga kerja TKI dan TKW. Bangsa ini harus menunjukkan kemampuannya mumpuni sebagai pimpinan – Presiden parlemen negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.

“Kenapa Indonesia memerlukan jadi Presiden PUIC. Kita tahu bahwa sebagian anggota parlemen OKI adalah negara Arab - Timur Tengah, dimana banyak TKI atau TKW kita bekerja. Selama ini image yang berkembang seolah-olah Indonesia adalah bangsa yang hanya mengirimkan TKI dan TKW. Kita perlu menunjukkan kepada negara itu bahwa Indonesia dapat menjadi bangsa yang menjadi pemimpin, Presiden bagi parlemen yang didalamnya banyak negara-negara Arab tempat saudara-saudara kita bekerja. Ini tentu mengangkat harkat dan martabat kita,” papar Hidayat Nurwahid, Ketua BKSAP dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1/12).

Mantan Ketua MPR ini menambahkan dengan cara itu harapannya bisa meningkatkan posisi tawar terutama dalam menuntaskan banyak persoalan terkait tenaga kerja terutama di Timur

Tengah. “Kita mengingatkan kembali Indonesia adalah negara terhormat dan selayaknya bila warga negaranya juga dihormati dimana-mana,” lanjutnya.

Ia menerangkan Indonesia dalam hal ini Ketua DPR RI Marzuki Alie terpilih menjadi Presiden PUIC dalam pelaksanaan sidang di Kampala, Uganda. Salah satu agenda yang akan segera dilaksanakan adalah menyelenggarakan Konferensi PUIC ketujuh di Palembang, Sumsel 24-31 Januari 2012.

Politisi PKS ini menyebut dalam konferensi ini salah satu resolusi yang sudah disiapkan Indonesia adalah agar parlemen negara-negara anggota OKI menyepakati untuk membuat regulasi yang akan menghormati tenaga kerja asing di negara masing-masing. Menurutnya beberapa hal sudah disepakati dalam pelaksanaan konferensi di Abu Dhabi tahun lalu. Di Palembang ditindaklanjuti dengan menyiapkan agenda

dioperasional yang lebih lengkap.

Beberapa resolusi lain yang disiapkan dalam konferensi di daerah yang terkenal dengan Jembatan Ampera ini antara lain upaya negara-negara anggota OKI melalui parlemennya mendukung Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB. Kemudian resolusi penguatan hubungan dibidang ekonomi agar negara-negara anggota OKI dapat mengantisipasi dampak krisis global yang melanda Eropa.

Hal lain yang kemungkinan mengemuka dalam konferensi yang diikuti 36 negara dengan 389 orang delegasi ini adalah agenda baru terkait permasalahan di Selat Hormuz yang sekarang memanas. “Kita lihat apakah rekan-rekan dari parlemen lain seperti Iran akan mengusulkan. Kita tentu siap membahasnya secara konstruktif,” demikian Hidayat. (iky) foto:ig/parle



Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid (kiri) bersama dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie (kanan) saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

Komisi I Minta Pemerintah Segera Serahkan RUU Veteran

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera menyerahkan RUU tentang Veteran sebagai usul Pemerintah.



Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan panglima TNI.

“Dalam Prolegnas DPR 2009-2014, Komisi pernah mengusulkan ke kepada Pemerintah dalam hal ini Kemhan untuk memasukan RUU tentang Veteran sebagai usul Pemerintah dalam prioritas pembahasan RUU tahun 2012”, tegas Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.

Saat Rapat Kerja Komisi I yang dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (24/1).

Mahfudz Siddiq menjelaskan bahwa Rapat Bamus DPR telah memutuskan pembahasan RUU tentang

Industri Strategis Pertahanan ditugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan. “Komisi I DPR RI sepatutnya untuk memulai pembahasannya pada masa sidang ini (Ke-III) dan mudah-mudahan dalam 2 periode masa sidang telah dapat diselesaikan,” paparnya.

Selanjutnya, Komisi I ditugaskan pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Cekoslavia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Selain itu, Rapat Bamus Tanggal 12 Januari 2011, komisi I DPR RI diberikan tugas untuk melakukan pembahasan terkait hibah barang milik Negara berupa KRI Karang Unarang (KUR) 985 yang merupakan inventaris TNI Angkatan Laut yang akan Pemda Sangihe yang akan digunakan sarana transportasi laut wilayah kepulauan Sangihe, yang akan diagendakan sesegera mungkin. (as) Foto : Agung

Komisi VI DPR Minta Pemerintah Permudah Investasi Mobnas

Komisi VI DPR RI meminta pemerintah memberikan kemudahan dan insentif pada investor nasional yang mau menanamkan modal untuk mengembangkan industri otomotif/mobil nasional.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR saat RDP dengan Deputi BUMN dan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1).

“Terkait kendala investasi, Komisi VI DPR RI minta pemerintah memberikan kemudahan dan insentif pada investor yang bersedia mengembangkan industri mobil nasional,” kata Aria Bima.

Komisi VI DPR RI, tambahnya, juga akan meminta instansi pemerintah terkait lainnya dan kalangan perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan industri mobil nasional. “Dukungan dari perbankan, sangat diperlukan dalam upaya pengembangan industri mobil nasional, karena selama ini pelaku industri otomotif lokal masih kesulitan mengakses pinjaman modal dari perbankan,” ujar Politisi PDIP ini.

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi

VI DPR meminta instansi pemerintah terkait khususnya Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi serta lembaga-lembaga riset meningkatkan koordinasi untuk mendukung pengembangan rancang bangun dan desain mobil nasional yang dirintis pelaku usaha nasional.

“Komisi meminta pemerintah memfasilitasi sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait industri mobil nasional. Supaya euforia mobil nasional ini betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai momentum mengembangkan industri otomotif nasional,” katanya.

Sementara itu Komisi VI DPR RI, menurut dia, sepatutnya membentuk Panitia Kerja Pengembangan Industri Otomotif Nasional untuk mendukung percepatan realisasi pengembangan industri mobil nasional. (nt) foto:parle

Timwas Century DPR RI Panggil Robert Tantular dan Lucas

Menindaklanjuti hasil audit forensik BPK, Timwas Century DPR RI hari ini Kamis (26/1) kembali menggelar rapat dengan mengundang pemilik Bank Century Robert Tantular dan Lucas (mantan pengacara Rafat Ali Rizfi).

Agenda rapat antara lain mende- ngarkan keterangan dari Robert Tantular yang didalamnya juga dipertanyakan perihal keterlibatan Rafat Ali Rizfi dan Hisyam Al Waraq. Robert datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Denny Kailimang.

Namun Rapat Dengar Pendapat Umum yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berlangsung cukup singkat, karena dalam penjelasan yang disampaikan baik oleh Robert Tantular maupun Lucas tidak ada hal yang baru.

Taufik Kurniawan menyatakan Timwas Century akan menjadwalkan rapat dengan memanggil BPK pada pekan mendatang, dengan agenda utamanya mencocokkan keterangan Robert dan Lucas menyangkut kasus Century dengan pemahaman BPK.

“Kita akan hadirkan BPK pekan depan untuk dikombinasikan data rapat hari ini,” kata Taufik.

Dalam rapat tersebut, saat diberi kesempatan oleh Timwas Century, Robert Tantular mantan direktur utama Bank Century menjelaskan informasi yang diketahuinya mengenai bank yang dulu kolaps dan merugikan negara triliunan rupiah. Namun penjelasannya banyak mendapat interupsi dari anggota Timwas DPR karena dianggap tidak memberi informasi baru.

“Tolong beri kami informasi yang baru. Kalau tidak ada, lebih baik kita cari informasi dari pihak lain,” kata Ganjar Pranowo(F-PDIP).

Hal yang sama dikemukakan oleh Chaeruman Harahap(F-PG). “Tujuan kita mengadakan rapat ini adalah untuk mencari data baru. Bukan untuk jadi tempat pembelaan diri,” katanya.

“Kita ingin data yang akurat, bukan hanya fiksi. Ternyata yang dibahas hanya seperti yang dulu,” kata I Gede Pasek (F-PD).



Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan



Penjelasan yang disampaikan Robert Tantular antara lain mempertanyakan kenapa hanya dirinya yang dipanggil sementara direksi Bank Century yang lain tidak. “Saya minta direksi Bank Century yang lain juga di-

undang. Setahu saya direksi Bank Century yang meminta suntikan likuidasi Rp1 triliun, tetapi saya tidak tahu kenapa bisa menjadi Rp6,7 triliun,” tutur Robert. (sc) foto:parle

Komisi I Minta Permen Digitalisasi Penyiaran

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri terkait Digitalisasi Penyiaran, yakni Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2011, sehubungan dengan perkembangan teknologi yang belum diatur.



Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman

Dalam Rapat Kerja Komisi I bidang penyiaran, yang dipimpin Wakil Ketua Hayono Isman, dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, mengagendakan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital dan Pengaturan Frekuensi 3G, di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (25/1).

Selanjutnya, Komisi I minta Kemenkominfo agar pelaksanaan program penyiaran digital tetap merujuk pada prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content*, sehingga tidak terjadi monopoli terkait kepemilikan hak penggunaan frekuensi, penyelenggara infrastruktur/Mux, dan penyelenggara program siaran disertai dengan seleksi yang ketat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar pelaksanaan program penyiaran digital tidak membebani ma-

syarakat, Komisi I minta agar set top box dapat diperoleh dengan harga semurah mungkin serta memberdayakan perusahaan dalam negeri, sehingga dapat menumbuhkan industri dalam negeri.

Sehubungan dengan peran strategis Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagai sabuk pengaman informasi tegaknya NKRI, Komisi I minta Kemenkominfo agar program penyiaran digital harus memprioritaskan LPP TVRI dan LPP RRI baik dalam penggunaan frekuensi maupun penyelenggaraan infrastruktur/Mux.

Dalam rangka pelaksanaan migrasi dari system analog ke digital, Kemenkominfo diminta agar pelaksanaan program penyiaran digital mengacu pada roadmap yang komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder terkait dengan penyiaran

serta melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat.

Terkait dengan pembukaan lelang (*third carrier*) frekuensi 3G di 2.1 Ghz, Komisi bidang penyiaran ini mendukung Kemenkominfo untuk memberikan prioritas kepada BUMN penyelenggara layanan jasa telekomunikasi dan memastikan penataan ulang frekuensi, sehingga setiap penyelenggara layanan jasa telekomunikasi mendapatkan alokasi frekuensi secara berdampingan.

Selain itu, mengingat komisi I tengah merumuskan draft Penggantian Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang akan mengatur juga aturan dan kebijakan mengenai program penyiaran digital, Kemenkominfo diminta untuk memberikan masukan terkait kebijakan program penyiaran digital. (as)

Komisi II DPR Minta Pemerintah Perbaiki Komposisi Tim Seleksi KPU

Komisi II DPR meminta pemerintah memperbaiki kesalahan komposisi Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana dalam komposisi tersebut ada posisi wakil ketua Amir Syamsudin yang juga Menteri Hukum dan HAM.

“Setelah berembuk, tadi ada pimpinan Komis II, perwakilan pemerintah Mendagri Gamawan Fauzi dan pimpinan fraksi-fraksi akhirnya disepakati bahwa telah terjadi kesalahan komposisi atas tim seleksi, jadi DPR minta pemerintah untuk memperbaiki komposisi tim seleksi tersebut sesuai UU 15 Tahun 2011” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1).

Sekedar informasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Keppres ini ditandatangani Presiden pada 2 Desember 2011.

Susunan nama Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu yakni: Ketua merangkap anggota: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Wakil Ketua



merangkap anggota: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, Sekretaris merangkap Anggota: A Tanribali L.

Sementara anggotanya: 1. Prof Dr Azyumardi Azra 2. Prof Dr Saldi Isra, SH 3. Anis Baswedan, PhD 4. Prof Dr Pratikno 5. Prof Ramlan Surbakti, MA

PhD 6. Dr Valina Singka Subekti, MSi 7. Dr R Siti Zuhro, MA 8. Dr Imam Prasodjo, MA Tim seleksi ini akan memilih 14 nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan 10 nama calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selanjutnya, nama-nama itu akan diserahkan kepada Presiden.(nt)

Sidang PUIC Diharap Berikan Terobosan-Terobosan

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid berharap dengan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7, akan dapat menghadirkan beragam terobosan dan memberikan sumbangan yang kuat bagi hubungan negara Islam dan Barat.

Hidayat menyampaikan hal itu diselenggarakan Sidang Komisi Khusus Politik dan Ekonomi, (Kamis 26/1) di Ballroom Hotel Arya Duta, Palembang.

Hidayat mengatakan, Delegasi Indonesia ingin mengambil peran dalam pendinginan suasana hubungan Barat dan Islam serta membangun demokrasi dinegara-negara Islam agar dapat bekerjasama secara global melalui demokratisasi untuk kemajuan dan ke-

adilan dunia.

Dia menambahkan, melalui konferensi ini juga menyepakati untuk mengirimkan delegasi dari Parlemen Negara-negara OKI untuk bertemu dengan delegasi Parlemen Negara-negara Eropa, Amerika Latin, serta Negara-negara Barat lainnya.

Menurutnya, Negara-negara Barat masih berpandangan terhadap Islam bahwa seolah-olah demokrasi tidak

mungkin dilakukan di Negara Islam. “Kita Parlemen Negara OKI akan mengirimkan delegasi itu sebagai komitmen kita untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan menghadirkan demokrasi yang berkualitas,” kata Hidayat.

Untuk itulah Thema yang diusung dalam Konferensi PUIC kali ini adalah “The need for Stronger PUIC for Democracy, Common Prosperity, Justice



Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid (kiri) menyampaikan usulannya di Sidang Komisi Khusus Politik dan Ekonomi, (Kamis 26/1) di Ballroom Hotel Arya Duta, Palembang.

and World Peace”.

Menurut Hidayat, tema besar ini diusung karena sesuai dengan ajaran Islam dan juga untuk kemaslahatan umat Islam, maka ingin menjadikan umat Islam semakin kuat dan lebih baik

dari sebelumnya. Melalui kinerjanya, organisasi PUIC juga mendapat peran yang baik di tingkat internasional.

Dalam konferensi kali ini, Indonesia juga telah mengupayakan untuk mengundang Parlemen dari Negara-nega-

ra Eropa yang mayoritas penduduknya ada yang beragama Islam seperti Albania dan Bosnia Herzegovina.

Albania, kata Hidayat, 75 persen rakyatnya beragama Islam, sedangkan Bosnia Herzegovina kurang lebih 43 persen penduduknya muslim. Sedangkan Negara-negara lain angka penduduk muslimnya berkisar di bawah 40 persen.

Saat itu, mereka menyampaikan kesediaan untuk hadir, namun karena bersamaan dengan agenda parlemen di Negara itu yang mengharuskan kehadiran anggota parlemen tersebut karena akan ada voting, maka kehadirannya batal.

Namun intinya, mereka mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah dan mereka berjanji untuk aktif. Keberadaan Albania dan Bosnia Herzegovina yang mayoritas muslim diharapkan dapat memberikan pembuktian kepada negara-negara Eropa lainnya tentang demokrasi di negara yang mayoritas penduduknya muslim. (tt) foto:ry/parle

Sidang PUIC Diharap Hasilkan Keputusan-Keputusan Bermanfaat Bagi Umat Islam

Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7 yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal 24 – 31 Januari diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat khususnya bagi kepentingan Organisasi PUIC dan seluruh umat Islam umumnya.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (tengah) pada Sidang Excom Konferensi PUIC di Hotel Aryaduta, Palembang

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang juga sebagai Ketua Executive Committee saat memimpin sidang Excom, Selasa (24/1) di Hotel Aryaduta, Palembang.

Priyo mengatakan dalam situasi dunia yang begitu dinamis, PUIC sebagai satu-satunya wadah bagi parlemen negara-negara berpenduduk muslim perlu merespon berbagai perkembangan dengan tepat, cepat komprehensif, berdasarkan nilai-nilai syariah bagi kemaslahatan umat.

“Ini penting dilakukan mengingat dunia luar kerap kali terlihat mendominasi penyelesaian isu-isu yang vital bagi kita umat muslim,” kata Priyo.

Berbagai situasi seperti isu Palestina, bencana humanitarian di Somalia, dinamika politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dan lain sebagainya direspon dengan sangat dinamis oleh masyarakat luar, namun lambat bagi kita.

Priyo menambahkan, mereka merespon perubahan yang terjadi di sekitar kita dengan sangat solid, sementara kita meresponnya dengan lemah. "Sungguh ironi, padahal umat muslim di dunia berjumlah sekitar 1,5 miliar jiwa," katanya.

Menurut Priyo, kondisi ini tentunya

perlu dicarikan jawaban dari tantangan-tantangan tersebut. Kita harus menjadi pihak pertama yang dapat menjawab tantangan tersebut.

Ditambahkannya, Parlemen sebagai salah satu lembaga perwakilan memiliki prinsip-prinsip konsultasi, musyawarah sebagaimana tersirat dalam nilai-nilai Islam (shoora). Parlemen sebagai entitas politik memiliki wewenang dalam kapasitasnya untuk memecahkan persoalan-persoalan rakyatnya.

Priyo berharap mengawali pertemuan dari Konferensi ke-7 PUIC melalui Executive Committee Meeting ini, dis-

kusi dapat berjalan dengan semangat saling menghormati, saling menghargai dalam kaidah hubungan antar-negara demi persatuan umat yang tersebar tidak hanya di 51 negara anggota OKI saja, tetapi juga bagi mereka yang hidup dalam komunitas atau menyandang status minoritas di negara masing-masing.

Sidang Executive Committee pagi ini membahas beberapa agenda yang telah diputuskan pada Sidang ke-26 Executive Committee di Ankara, Turki, tanggal 20-21 November lalu. (tt) foto: ry/parole

Anggota PUIC Diminta Dorong 6 Negara Untuk Bergabung

Sekjen PUIC Mahmud Erol Kilic meminta anggota negara-negara PUIC untuk mendorong 6 (enam) negara lainnya untuk bergabung dalam organisasi ini. Saat ini, negara yang tergabung dalam OKI ada 57 negara dan yang tergabung menjadi anggota PUIC 51 negara.

Masih ada enam negara lagi yang belum tergabung, diantaranya Brunei Darussalam, Maladewa, Uzbekistan, Komoro.

Demikian disampaikan Sekjen PUIC dalam rapat tertutup Executive Committee yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dan juga dihadiri Presiden PUIC Marzuki Alie, Selasa (24/1) di Hotel Aryaduta, Palembang.

Mahmud mengatakan, pada konferensi kali ini, Maldives telah menyatakan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota tetap PUIC. Maldives telah masuk menjadi anggota OKI sejak tahun 1976. Keinginan Maldives menjadi anggota tetap PUIC akan dibahas lebih lanjut dalam konferensi PUIC kali ini.

Dia menambahkan, berkat bantuan DPR RI, Maladewa telah merespon dengan baik niatnya untuk bergabung menjadi anggota. Namun niat untuk bergabung tidak pada persidangan kali ini, kemungkinan pada konferensi berikutnya.

Mahmud menambahkan, kehadiran status peninjau pada konferensi kali ini merupakan langkah awal yang sangat baik sebelum negara-negara tersebut



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (tengah) pada rapat tertutup Excom di Hotel Aryaduta, Palembang

bergabung masuk menjadi anggota. Di antara tamu yang hadir adalah Brunei Darussalam, Maldives, dan Nigeria.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pada konferensi kali ini Brunei Darussalam akan hadir sebagai Guest of the Host, tapi belum ada niat

untuk bergabung. Demikian juga untuk Nigeria juga akan hadir sebagai tamu. Negara tersebut mengatakan akan bergabung pada pertemuan berikutnya.

Hidayat mengatakan, Parlemen Indonesia akan berperan aktif menghubungkan anggota-anggota yang belum menjadi anggota PUIC untuk dapat berperan aktif. (tt) foto: ry/parole

Sudan Hampir Dipastikan Tuan Rumah PUIC Mendatang

Sudan hampir dipastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) mendatang. Sebelumnya direncanakan tuan rumah PUIC mendatang adalah negara Syria. Namun karena kondisi negara tersebut belum kondusif, maka Sudan bersedia menggantikan Syria menjadi tuan rumah.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (tengah) pada Sidang Excom Konferensi PUIC di Hotel Aryaduta, Palembang

Keinginan Sudan ini disampaikan Sekjen PUIC Mahmud Erol Kilic dalam Sidang Executive Committee, Rabu (25/1) di Hotel Arya Duta, Palembang, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Pada Sidang Excom sebelumnya (Selasa 24/1) Priyo meminta Sekjen PUIC untuk membicarakan dengan pihak Syria tentang rencana Syria men-

jadi tuan rumah pelaksanaan PUIC yang akan datang. Hal ini mengingat, kondisi dalam negeri Syria yang tengah bergelolak. Kalau pihak Syria bersedia dialihkan karena ketidaksiapan dalam negeri, sidang akan tetap meminta yang mengganti menjadi tuan rumah adalah negara-negara di kawasan Arab sebagaimana lazimnya karena Syria adalah termasuk blok negara Arab.

Kalau Syria bersikukuh menyelenggarakan PUIC, harus tetap ada jalan tengahnya yaitu karena situasi darurat yang tidak memungkinkan harus ada alternatif negara yang akan menggantikannya. Dalam hal ini, kata Priyo, Rapat Excom memutuskan tetap menjadi hak dan prioritas negara-negara di kawasan Arab untuk menggantikannya.

Mahmud mengatakan, setelah dia membicarakan dengan Parlemen Syria, Syria setuju tuan rumah pada sidang berikutnya adalah negara kawasan Arab lainnya.

Menurut Mahmud, Sudan siap dan berkeinginan untuk menjadi tuan rumah pada sidang berikutnya. "Hampir dapat dipastikan 90% Sudan siap," kata Mahmud.

Namun, katanya, keputusan final tersebut menunggu Ketua Parlemen Sudan hadir, yang direncanakan akan tiba esok hari.

Jika negara-negara Arab group tidak ada yang mengajukan diri lagi menjadi tuan rumah, kata Mahmud, maka Sudanlah tuan rumah pelaksanaan Konferensi PUIC mendatang. Namun, jika ada kelompok Arab lainnya yang menawarkan diri menjadi tuan rumah, maka akan diambil dengan pemilihan.

Keinginan Sudan ini disambut baik oleh Saudi Arabia yang menyatakan dukungannya. Demikian juga untuk Algeria yang juga menyatakan dukungan yang sama.

Bahkan dalam kesempatan tersebut, Parlemen dari Burkina Faso juga menyatakan keinginannya menjadi tuan rumah pada kesempatan sidang berikutnya.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyambut baik keinginan Parlemen Burkina Faso dan tentunya ini menjadi bahan pertimbangan bersama. Priyo mengatakan ketertarikannya untuk berkunjung ke daerah tersebut yang terletak di Afrika Barat. (tt) foto:ry/parle

Sidang Excom Tetapkan 9 Anggota Komite Pakar

Sidang Executive Committee yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso Rabu (25/1) telah berhasil menetapkan 9 (sembilan) anggota Komite Pakar yang diberi tugas untuk membahas Draft Deklarasi Parlemen Negara-negara Islam.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kedua dari kiri) saat memimpin Sidang Executive Committee di Hotel Aryaduta, Palembang

Ke Sembilan Komite Pakar yang ditunjuk adalah Algeria, Cameroon, Indonesia, Iran, Sinegal, Syiria, Turki, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid, penunjukan Komite Pakar ini berlangsung sangat alot, karena sebelumnya nama yang diusulkan terdiri dari 12 negara.

Pembicaraan juga berlangsung alot tentang pembahasan Draft Deklarasi Parlemen Negara-negara Islam, karena draft yang diusulkan Arab Saudi tersebut baru diterima Anggota Parlemen Negara PUIC satu hari sebelumnya.

Iran dan Turki keberatan jika Draft Deklarasi tersebut dibahas pada sidang kali ini. Karena draft tersebut disampaikan terlambat, Parlemen Iran meminta agar diberi waktu untuk mempelajari terlebih dahulu.

Menurutnya, membahas draft Deklarasi ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk melahirkan

keputusan-keputusan penting bagi negara Islam. Karena itu, katanya, pembahasan draft tersebut tidak perlu dilakukan tergesa-gesa.

Pembahasan draf ini menurutnya perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan melibatkan para pakar dinegara masing-masing. Untuk itulah dia meminta pembahasan draft Deklarasi ini ditunda bukan pada sidang Executive Committee kali ini.

Senada dengan Iran, Parlemen Turki mengatakan, dalam batas normal seharusnya draft tersebut disampaikan pada anggota-anggota parlemen 60 hari sebelumnya dan jika dalam keadaan mendesak minimal 30 hari sebelumnya.

Karena perdebatan berlangsung alot, akhirnya Hidayat Nur Wahid memutuskan untuk membawa masalah tersebut pada Sidang Excom yang berlangsung siang hari.

Sekjen PUIC Mahmud Erol Kilic mengatakan, diakui bersama draft yang disampaikan memang terlambat. Draft tersebut juga perlu disempur-

nakan dengan mendapatkan berbagai masukan dari anggota negara-negara PUIC.

Dia juga sependapat pembahasan draft tersebut tidak perlu dilakukan tergesa-gesa, karena draft tersebut perlu kajian lebih mendalam.

Mengingat agenda Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7 yang berlangsung di Palembang ini sangat padat, dia mengusulkan draft tersebut dibahas pada pertemuan lain, setelah dua atau tiga bulan pelaksanaan konferensi ini. Dalam hal ini perlu mengadakan pertemuan dua atau tiga kali untuk menyamakan persepsi dari masing-masing negara.

“Yang jelas sebelum Sidang PUIC berikutnya diselenggarakan draft ini sudah dapat diselesaikan,” katanya.

Pertemuan dapat diadakan di markas besar PUIC di Teheran atau Turki sendiri juga siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan ini. (tt) foto:ry/parle



الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
والإجتماعات الأخرى المصاحبة
بالمبانغ - الجمهورية الإندونيسية
2012 31-24 يناير

**7TH SESSION OF THE PARLIAMENTARY UNION
OF THE OIC MEMBER STATES (PUIC) CONFERENCE**

Palembang - Indonesia, 24-31 January 2012

**7^{ÈME} SESSION DE LA CONFERENCE
DE L'UNION PARLEMENTAIRE DES ETATS MEMBRES DE L'OCI
(UPCI)**

Palembang - Republique d'Indonesie 24-31 Janvier 2012

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id